

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika mengatur perilaku pemerintah di lembaga resmi pemerintah. Pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya harus berlandaskan pada pedoman yang dapat mengarahkan tindakan seluruh perilaku yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh (Kohlberg et al., 1973) memberikan dasar untuk memahami pertimbangan moral pada penilaian etis. Teori perkembangan moral menyatakan setiap individu melewati sejumlah tahapan moral yang berbeda. Perkembangan moral merupakan awal terbentuknya ideologi etis dimana individu yang berhasil dalam perkembangan moral dapat menilai dan berperilaku etis sedangkan yang gagal dalam perkembangan moral tidak mampu atau bahkan tidak mampu menilai dan berperilaku etis.

Etika dalam islam sangat penting karena islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aspek kehidupan manusia. Standar etik dan moral tersebut diambil dari banyak dan luasnya ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Ajaran Islam menekankan ketaatan pada kode etik dan moral dalam perilaku manusia. Prinsip-prinsip moral dan kode etik berulang kali ditekankan oleh Al-Qur'an selain itu, ada banyak ajaran Nabi

Shallallahu 'alaihi wasalam yang mencakup etika moral dan etika. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: (Surah Al-Qasas: Ayat 77)

وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيئِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أُنْثَكَ فِيمَا وَابْتِغِ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْفَسَادِ تَبْتَغِ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Etika institusional adalah penerapan etika umum yang mana memberikan aturan terkait agensi. Pemerintah merupakan lembaga atau dengan kata lain sebuah organisasi aparatur negara yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita dalam bernegara. Oleh karena itu, etika pada hakikatnya adalah mengkaji sejauh mana faktor demografi dan moral relativisme berdampak terhadap penilaian etika di instansi. Penilaian etis berlaku bagi orang-orang yang berada dalam organisasi pemerintahan, kesempurnaan hukum baik kalimat maupun materi tidak menjamin terciptanya tata kelola yang baik jika penyelenggaranya tidak memiliki akal budi yang beretika. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tuntutan dasar pemerintahan modern dimana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah. UUD 1945 mewajibkan negara menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar setiap warga negaranya dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Kalimantan Timur sebagai topik penelitian memiliki keunikan tersendiri dari segi demografi dan moral relativisme. Dalam dunia kerja, etika berkembang dengan cara penerapan sebuah aturan atau biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan aturan atau perbuatan yang harus dilakukan dan harus di hindari, pada tahun 2019 di Kalimantan Timur terjadi penggelapan dana infrastruktur di lingkungan pemerintahan daerah Kutai Timur dengan itu maka diberikan sanksi 7 tahun penjara dan denda 500 juta.

Sebuah instansi dapat mengontrol tindakan atau perilaku dari seorang pegawai karena adanya kode etik. Hal ini terjadi karena ketika seorang pegawai melanggar kode etik tersebut, dapat berdampak pada sanksi yang diberikan dimana sanksi tersebut berbeda beda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Pada praktiknya, penerapan kode etik pada sebuah instansi tidak selalu berjalan dengan lancar. Pelanggaran mengenai kode etik masih sering terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan. Pada tahun 2018, secara statistik terdapat total 3.383 hukuman yang dijatuhkan pada PNS yang diakibatkan adanya pelanggaran kode etik ASN. Secara lengkap, berikut adalah data hukuman yang dijatuhkan kepada aparatur sipil negara.

Tabel 1.1 Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat/Daerah Tahun 2017-2018

No	Jenis Hukuman	Jumlah	
		2017	2018
1	Hukuman Ringan	759	862
2	Hukuman sedang	773	854
3	Hukuman berat	1534	1667
Total		3.066	3.383

Sumber: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (2018)

Data diatas menggambarkan besarnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Bahkan jika dibandingkan tahun 2017, tahun 2018 jumlah sanksi yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 317 sanksi yang diberikan atau naik sebesar 8,82%. Terlebih lagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh senior atau yang telah lama mengabdikan, pada tingkat junior juga terdapat beberapa pelanggaran yang menyebabkan adanya sanksi.

Dalam penelitian (Ghazali, 2021) penulis hanya membahas terkait (*gender*, usia, posisi saat ini, nilai etika perusahaan) penulis merasa perlu melakukan penelitian lanjut terhadap penilaian etika yang dilakukan terhadap instansi pemerintahan. Dalam hal ini, penulis mengangkat dua faktor penting yang dianggap dapat dijadikan pertimbangan, yaitu faktor demografi dan moral relativisme. Dalam penelitian (Ghazali, 2021) yang menganalisis terkait *ethical judgment*. Penulis menemukan gap yang bisa dikaji untuk memenuhi kebutuhan intelektual, yaitu menganalisis faktor eksternal terhadap penilaian etis.

Pembuatan keputusan etis merupakan sebuah proses psikologis ketika menghadapi dilema etis dalam membuat penilaian benar atau salah secara moral. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh (Kohlberg et al., 1973) dan (Gilligan, 1982) mengemukakan bahwa *gender*, usia, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berdampak pada penilaian etis. Menggunakan teori ini dalam penelitian ini akan memberikan beberapa indikasi

apakah teori, yang didasarkan pada barat dan negara maju, juga berlaku untuk negara berkembang.

Penelitian ini akan mengkaji faktor demografi (*gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan) dan moral relativisme terhadap penilaian etis instansi. Penilaian etis telah didefinisikan sebagai memutuskan tindakan mana yang benar secara etis dan penilaian individu terhadap tingkat atau sejauh mana keputusan tertentu diambil etis atau tidak etis (Sparks & Pan, 2010). (Carlson et al., 2002) lebih lanjut mendefinisikan etika pengambilan keputusan sebagai itu proses oleh yang individu menggunakan milik mereka moral pemikiran ke memastikan etika situasi tertentu. Memeriksa dampak faktor demografi pada penilaian etis juga relevan, karena dapat memberikan beberapa indikasi apakah variabel internal seperti *gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan dan moral relativisme memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada lingkungan eksternal.

Urgensi mengenai penilaian etis belum disertai bukti empiris yang konsisten. Hal ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh (Resty et al., 2019) dimana peneliti memiliki tujuan untuk membuktikan hubungan antara *gender* dengan penilaian etis di Minangkabau. Hasil dari penelitian tersebut adalah terbukti jika *gender* memiliki peran dalam menjelaskan *ethical judgement* dimana seorang wanita tidak lebih etis dalam melakukan penilaian etis. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh penelitian (Muna et al., 2021). Dalam penelitiannya mengungkapkan

bahwa *gender* memiliki hubungan *secara* positif dan signifikan terhadap penilaian etis mahasiswa. Namun (Sri Wahyuni et al., 2019) menyatakan hasil yang berbeda yang menyebutkan bahwa *gender* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan etis baik dari pengakuan, penilaian etis maupun niat etis. Penelitian tersebut, dilakukan dengan tujuan untuk melakukan studi empiris mengenai hubungan antara *gender* dengan penilaian etis manager dalam melakukan investasi terkait tanggung jawab perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gender* tidak memiliki pengaruh dengan adanya penelitian etis perusahaan. (Emerson et al., 2007) dalam penelitiannya menguji pengaruh perbedaan jenis profesi, *gender*, rasa tau etnis, usia dan tingkat ketaatan dalam beribadah sebagai faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi penilaian etis seorang akuntan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *gender*, usia dan ketaatan beribadah diterima terhadap penilaian etis seorang akuntan.

Penelitian oleh (Wijayanti et al., 2017) menyatakan bahwa usia seseorang bukanlah penentu seseorang dalam memberi pengaruh terhadap dilema etika. Tetapi, usia memberikan peranan penting seseorang dalam melakukan perkembangan kognitif dengan ditunjukkan kedewasaan seseorang sebagai bentuk tindakan. Usia dewasa akan menentukan perilaku yang menjunjung tinggi maupun rendahnya nilai etis dibandingkan dengan seseorang yang lebih muda (Rosalina, 2017).

Variabel lain yang mempengaruhi penilaian etis yaitu *current position*, ini mengacu pada penunjukan pekerjaan saat ini. Secara umum bahwa posisi yang lebih tinggi memiliki lebih banyak tanggung jawab. Studi sebelumnya yang mendokumentasikan pentingnya pengalaman kerja termasuk (Kidwell et al., 1987) yang melaporkan pengalaman kerja yang lebih lama dikaitkan dengan tanggapan yang lebih etis. Oleh karena itu, sangat penting bahwa posisi senior, yang biasanya melibatkan lebih banyak pengambilan keputusan, dipegang oleh orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang beretika.

Nilai etika perusahaan merupakan variabel signifikan yang menentukan penilaian etika. Nilai etika perusahaan (*corporate ethical value*) merupakan sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi (Dewayanti et al., 2022). Nilai etika perusahaan mendukung suasana kerja atasan yang positif, yang merupakan kunci penting dan faktor penentu dalam pencegahan perilaku menyimpang. (Rezkyanti & Fitriawan, 2020). Nilai etika perusahaan berkontribusi positif terhadap pembentukan komitmen organisasi di kalangan karyawan perusahaan (Roberts & Dowling, 2002). Artinya semakin baik etika perusahaan maka semakin besar komitmen atau komitmen karyawan terhadap organisasi perusahaan. (Hunt & Wood, 1989) juga menemukan korelasi positif antara etika bisnis karyawan dan keterlibatan organisasi.

Relativisme merupakan suatu sikap penolakan pada nilai moral yang bersifat absolut dalam mengarahkan perilaku etis, hubungan ideologi etika ditemukan berpengaruh signifikan terhadap penilaian etis (*ethical judgements*)

(Forsyth, 1980); (Barnett, 1998); (Callanan et al., 2010);. Penilaian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penilaian etis dengan menambahkan variabel baru yaitu moral relativisme.

Penelitian oleh (Aziz & Cahyonowati, 2015) menjelaskan bahwa *ethical ideology* yang ditinjau dari relativisme memiliki pengaruh dengan penilaian etis namun pengaruhnya mengarah ke negatif. Hasil tersebut memiliki arti bahwa ketika seseorang memiliki tingkat relativisme yang semakin rendah, maka penilaian etis orang tersebut akan semakin tinggi. Namun hasil berbeda ditemukan oleh (Dzakarin, 2013). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa relativisme yang diukur dengan moral yang dimiliki tidak dapat menjelaskan penilaian atau persepsi etis seseorang.

Penelitian terdahulu mengenai oleh (Ghazali, 2021) hanya membahas terkait (*gender, usia, current position, nilai etika perusahaan*) karena itu dilakukannya penelitian ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penilaian etis yang dilakukan terhadap instansi pemerintahan Kalimantan Timur, dengan menambahkan penjelasan variabel moral relativisme karena pada penelitian terdahulu sebelum terdapat penjelasan lebih lanjut terkait pengaruh moral relativisme terhadap penilaian etis. Sehingga penilaian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penilaian etis dengan menambahkan variabel baru yaitu moral relativisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, terkait etika pada hakikatnya adalah mengatur atau pedoman tingkah laku manusia dan penilaian etis berlaku bagi orang-orang yang duduk dalam organisasi pemerintahan, maka penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan:

1. Apakah wanita cenderung lebih etis dalam penilaian etis daripada pria?
2. Apakah usia berpengaruh positif terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur?
3. Apakah *current position* berpengaruh positif terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur?
4. Apakah nilai etis perusahaan berpengaruh positif terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur?
5. Apakah moral relativisme berpengaruh negatif terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris wanita cenderung lebih etis dalam penilaian etis daripada pria.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif usia terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif *current position* terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif nilai etis perusahaan terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh negatif moral relativisme terhadap penilaian etis di instansi pemerintahan Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah konsep atau teori yang bisa memberikan kontribusi di bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melakukan analisis terkait *gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan dan moral relativisme terhadap penilaian etis di Kalimantan Timur.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait *gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan dan moral relativisme terhadap penilaian etis di Kalimantan Timur.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang etika pada instansi pemerintahan dan dapat bermanfaat karena dapat menambah pemahaman kepada staff yang bekerja di instansi pemerintah pemahaman terkait *gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan dan moral relativisme terhadap penilaian etis di Kalimantan Timur.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait *gender*, usia, *current position*, nilai etis perusahaan dan moral relativisme terhadap penilaian etis di Kalimantan Timur.